EXECUTIVE SUMMARY

Oleh Lilik Rahmawati

Menguak Gurita Mafia Impor Pangan di Indonesia: Perspektif Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Abstraks: Penelitian ini membahas masalah impor pangan di Indonesia dan perspektif sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan berpangkal pada permasalahan: (1) praktik mafia impor pangan di Indonesia, (2) pengaruh impor pangan terhadap pedagang, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat umum di Indonesia, dan (3) regulasi impor pangan pemerintah Indonesia dan implikasinya terhadap ketahanan pangan di Indonesia, serta (4) perspektif sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif–analisis. Analisis terhadap praktik impor pangan di Indonesia dan perspektif sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan ketahanan pangan menggunakan tiga konsep yaitu konsep ketersediaan pangan dengan menggunakan teori produksi Islam dan mekanisme pasar Islam, konsep keterjangkauan pangan dengan konsep distribusi Islam yang berkeadilan, serta konsep pemenuhan kebutuhan pangan dengan konsep konsumsi Islam. Analisis data yang dilakukan bersifat juga iteratif (berkelanjutan) yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: pertama, praktik mafia impor pangan dilakukan dengan cara pemalsuan data kebutuhan pangan, pemalsuan dokumen, penghindaran pajak dan bea masuk, pelanggaran kuota, serta pengubahan regulais.; kedua, Dampak impor sangat dirasakan oleh petani, nelayan, pengusaha kecil, dan masyarakat umum lainnya; ketiga, Regulasi kebijakan pangan di Indonesia mengalami dinamisasi dari waktu ke waktu, mulai zaman kuno klasik sampai pemerintahan SBY; dan keempat Perspektif Ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui tiga pilar penting yaitu ketersediaan pangan dengan konsep produksi Islam dan mekanisme pasar, keterjangkauan pangan dengan konsep distribusi yang berkeadilan, dan konsep pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengusung konsep konsumsi Islam
Kata Kunci: mafia impor, impor pangan, Sistem Ekonomi Islam

A.Latar Belakang

Pangan merupakan hal yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus wujud kemampuan suatu negara dan bangsa mempertahankan eksistensinya sebagai suatu Negara yang berketahanan nasional. Disamping itu, terpenuhi atau tidaknya pangan bagi rakyat dalam suatu negara akan berimplikasi secara luas ke wilayah ekonomi, sosial dan politik yang nantinya akan berdampak kepada stabilitas negara. Seperti yang dikatakan Soekarno, presiden pertama Indonesia bahwa pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka terjadilah malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar-besaran, radikal dan revolusioner untuk memenuhi kebutuhan pangan (ketahanan pangan).[1]

Selain wujud eksistensi sebuah negara, pemenuhan pangan masyarakat merupakan hal yang paling mendasar dalam konteks kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan dalam UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan disebutkan bahwa adalah ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.[2] Peran negara dalam hal ini adalah bagaimana kebutuhan yang menyebabkan kesejahteraan tersebut dikelola sedemikian rupa agar masyarakat secara keseluruhan merasa sejahtera.

Alih-alih sejahtera, bahkan beberapa peristiwa yang dialami bangsa ini justru meneguhkan adagium jauh panggang dari pada api. Cita-cita menjadi Negara swasembada pangan sepertinya hanya impian. Pada Awal tahun 2013 ini, masyarakat Indonesia dihadapkan beberapa permasalahan terkait pangan. Yang cukup menyita perhatian adalah kasus suap impor daging sapi yang disinyalir melibatkan salah satu mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mantan Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaaq ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap impor sapi. Dalam kasus itu, selain Lutfi KPK menetapkan juga tersangka lain yakni Ahmad Fathanah, serta direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya.

[1] Pidato Bung Karno pada Konferensi Colombo Plan di Yogyakarta 1953 dalam Nouval F Zacky, *Petaka Politik Pangan di Indonesia; Konfigurasi Kebijakan Pangan yang Tak Memihak Rakyat*, (Malang: Intrans, 2010), 10

[2] Anonim, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan*, (Kantor Menteri Negara Pangan RI, 1996), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian uang itu diduga berkaitan dengan kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna.[3]

Drajad wibowo, salah satu ekonom Indonesia sekaligus wakil ketua umum Partai Amanah Nasional (PAN), menjelaskan bahwa beberapa modus mengeruk keuntungan dari kebijakan proimpor tak hanya melibatkan politisi, namun aparat pemerintah di lapangan serta pengusaha. Ada beberapa modus yang dilakukan *pertama*, adalah estimasi kebutuhan komoditi pangan yang dilebih-lebihkan demi memunculkan kesan terdapat gap besar antara permintaan pasar dan produksi sehingga impor menjadi keharusan. *Kedua*, membuat lonjakan harga komoditas pangan pada bulan-bulan tertentu sehingga, impor pangan terjustifikasi. *Ketiga*, mendorong kemudahan perpajakan sehingga importir mendapat keuntungan besar dari pembebasan PPN, bea masuk, dan PPh. Keuntungan besar ini yang kemudian dibagi-bagi kepada siapa saja yang membantu menjaga impor, baik politisi, birokrat, atau siapa saja. *Keempat*, memainkan berbagai mekanisme pengaturan seperti kuota impor perusahaan, sementara fakta di lapangan menunjukkan impor setiap komoditas pangan itu hanya dikuasai oleh segelintir pemain.[4] Terjadinya kasus dugaan suap impor sapi menjadi semacam pembuka mata, bahwa kebijakan pro-impor pangan adalah lahan subur untuk terjadinya praktik kecurangan. Bahkan **Guru** Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Prof Bustanul Arifin mengatakan pelaku kasus impor sapi bisa dikategorikan sebagai mafia.[5]

[3]www.BeritaSatu.Com, *Kebijakan Impor Pangan Ciptakan Modus Mafia Keruk Keuntungan,* diakses pada tanggal 12 Maret 2013.
[4]www.BeritaSatu.Com, *Kebijakan Impor Pangan Ciptakan Modus Mafia Keruk Keuntungan,* diakses pada tanggal 12 Maret 2013.
[5] www.kompas.com, *Mafia Sapi Ada di Hulu-Hilir*, diakses pada tanggal 12 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum tuntas kasus impor daging sapi, menyeruak lagi kasus penimbunan puluhan kontainer bawang merah dan bawang putih impor di pelabuhan Tanjung Perak yang mengakibatkan melambungnya harga bawang merah dan bawang putih. Ada sekitar 200 kontainer bawang putih impor tanpa dokumen.[6]. Disinyalir para importir bawang sengaja menimbun bawang untuk mempermainkan harga bawang di pasar. Imbasnya terjadi kenaikan harga bawang merah dan putih sampai 300 persen. Bawang merah sampai menembus angka Rp. 50.000/kg sedangkan harga bawang putih mencapai Rp.70.000/kg. Tak pelak kenaikan harga ini membuat para ibu rumah tangga, pedagang sayur, pengusaha makanan pusing mengatur anggaran belanjanya. Memang beberapa tahun terakhir Indonesia yang merupakan Negara agraria mengimpor bawang putih dari China dan India. Impor dilakukan menyusul keterbatasan pasokan dari dalam negeri. Menurut Menteri pertanian beberapa sentra bawang di Indonesia yaitu Pemalang, Lombok Tengah, belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.[7]

Tidak bisa pungkiri, dengan penduduk yang mencapai 240 juta jiwa, Indonesia merupakan pangsa pasar strategis bagi perdagangan Internasional. Terlebih semenjak diterapkannya perdagangan bebas, produk -produk impor kian membanjiri pasar lokal, menggerus pasar domestik. Tidak kurang dari 8000 item barang yang diimpor Indonesia.[8] Mulai barang elektronik, otomotif, bahkan singkong dikabarkan impor dari Vietnam. Produk-produk impor yang membanjiri Indonesia tidak semua aman dan sehat, bahkan kebanyakan produk impor tersebut justru berbahaya. Membanjirnya produk-produk luar negeri adalah implikasi dari penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia pada Januari 1998. Kesepakatan tersebut

[6] www.republika.co.id. *DPR Minta 200 Kontainer Dimusnahkan,* diakses tanggal 20 Maret 2013.
[7] www.republika.co.id. *DPR Minta 200 Kontainer Dimusnahkan,* diakses tanggal 20 Maret 2013.
[8] www.bisnis.com. *Kebijakan Impor-Importir Umum Dibatasi,* diakses tanggal 15 Maret 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tonggak sejarah kebijakan pro-impor pangan Indonesia. Dampaknya terjadi perubahan dari sisi orientasi kebijakan, semula Presiden Soeharto yang berorientasi pada swasembada pangan serta pengamanan produksi dan harga bagi petani, menjadi orientasi kebijakan sangat pro-impor pangan. Tidak disadari kebijakan pro-impor pangan yang dilakukan pemerintah telah membuat masyarakat terlena dan sangat tergantung. Dengan harga yang lebih murah, masyarakat lebih menyukai produk impor dari pada produk lokal.

Bertolak belakang dengan kebijakan impor, melihat kekayaan alam yang ada di Indonesia, maka bukan rahasia lagi bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam. Atas kekayaan yang melimpah ini, Indonesia dikenal sebagai Negara agraris dengan lumbung padinya yang melimpah sampai mampu melakukan swasembada pangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun sekarang, Indonesia justru sebagai negara pengimpor beras. Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Indonesia juga dikenal sebagai Negara maritim, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang ke-4 di dunia. Hal tersebut berpotensi menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim dengan kekayaan garam yang melimpah. Sayangnya, dengan perairan yang cukup luas, Indonesia justru mengimpor garam dari India.[9]

Dengan kekayaan alam yang melimpah, seyogyanya Indonesia bisa menjadi negara yang mempunyai kemandirian pangan, rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, berbagai bentuk krisis pangan terjadi. Krisis pangan bahkan banyak dialami oleh keluarga petani. BPS mencatat, selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah

[9] www.neraca.co.id, *Kebijakan Impor Garam Harus Bisa Akomodasi Kepentingan Masyarakat*. Diakses tanggal 20 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara konsisten. Pada 2009 jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sekitar 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia.[10] Data dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia berada di peringkat kelima negara dengan kekurangan gizi sedunia. Jumlah tersebut merupakan 4,5 persen dari jumlah balita Indonesia, yakni 23 juta jiwa. Daerah yang kekurangan gizi tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah bagian timur Indonesia.[11]

Menjadi keharusan pemimpin negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam sistem Islam, seorang pemimpin wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya termasuk dalam hal ini pangan. Ketahanan pangan dalam konsep sistem ekonomi mengharuskan negara dalam hal ini khalifah memastikan adanya jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.[12] Ketahanan pangan ini mencakup jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan kemandirian pangan negara.

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan akan menentukan ketahanan pangan Negara. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber

---

[10] www.BPS.go.id, *Data Statistik Kemiskinan*, diakses 22 Maret 2013
[11] www.depkes.go.id, *Indonesia Peringkat Kelima Gizi Buruk*, diakses 22 Maret 2013
[12] Taqiyuddin, Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya manusia. Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi tingkat kemajuan dan daya saing suatu negara. Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari dalam negeri. Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negara tergadai pada negara lain. Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara.

Berpijak dari urgensi ketahanan pangan bagi suatu negara berikut fakta kekayaan alam Indonesia yang justru tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan dilakukan impor dengan sederet permasalahan yang menyertainya termasuk kasus mafia impor pangan serta kekayaan alam Indonesia yang tidak membuat rakyat menjadi sejahtera bahkan mengalami kemiskinan, menjadi perlu untuk mengkaji bagaimana konsep ketahanan pangan dalam sistem ekonomi Islam melalui penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini berupaya mengkaji praktik mafia impor pangan di Indonesia berikut pengaruhnya di masyarakat, regulasi yang mengatur impor pangan, dan perspektif sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik mafia impor pangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh impor pangan terhadap pedagang, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat umum di Indonesia?
3. Bagaimana regulasi impor pangan pemerintah Indonesia dan implikasinya terhadap ketahanan pangan di Indonesia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaimana analisis perspektif ekonomi Islam terhadap permasalahan impor di Indonesia dan solusinya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

C. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian. Artinya posisi yang akan dilakukan merupakan penelitian yang baru atau penelitian pengembangan sehingga tidak dikategorikan *duplicated research*. Ada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu berikut letak perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

1. Komoditas peternakan, mafia, dan perekonomian kita.[13]

   Penelitian ini membahas tentang posisi komoditas peternakan dalam perekonomian di Indonesia sekaligus problem mafia yang menyertainya. Salah satu fokus permasalahan penelitian di atas adalah mafia impor. Meskipun membahas mengenai mafia impor, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti secara umum membahas mafia impor pangan, sementara penelitian di atas membahas mafia impor pada sektor peternakan.

2. Analisis Impor Beras Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Beras[14]

   Penelitian ini mengkaji kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah dari masa ke masa serta pengaruhnya terhadap harga beras lokal. Meskipun penelitian ini juga mengkaji pengaruh impor, sebagaimana fokus permasalahan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, namun penelitian yang akan

[13] Anang Mohammad Legowo, *Komoditas peternakan, mafia, dan Perekonomian kita*, Jurnal Inspirasi Vol 2 No.31, Undip Semarang

[14] Abdul Aziz, *Analisis Impor Beras Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Beras, Skripsi, 2006, IPB Bandung*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan peneliti spesifik membahas pengaruh impor pangan bagi pedagang, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat umum.

3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Beras di Jawa Timur[15]

   Penelitian ini lebih spesifik membahas aplikasi impor beras di Jawa Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Walaupun penelitian ini membahas impor pangan dalam hal ini beras, namun fokus permasalahan yang dikaji relatif berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena penelitian di atas menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Beras di Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti selain membahas pengaruh impor pangan bagi pedagang, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat umum, juga mengkaji perspektif sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, fokus kajian tentang mafia impor sudah dilakukan pada penelitian pertama. Namun penelitian yang secara spesifik membahas ketahanan pangan perspektif Islam, sepanjang peneliti telusuri belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Karena penelitian yang akan dilaksanakan ini hanya punya kesamaan di satu sisi saja, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini adalah berbeda dan bukan merupakan *duplicated research*.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mendeskripsikan praktik mafia impor pangan di Indonesia.

[15]Ahmad Radix, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Beras di Jawa Timur*, Skripsi, 2010, UPN Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendeskripsikan pengaruh impor pangan terhadap pedagang, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat umum di Indonesia.
3. Mendeskripsikan regulasi impor pangan pemerintah Indonesia dan implikasinya terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
4. Menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap permasalahan impor di Indonesia dan solusinya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis diantaranya adalah

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wacana keilmuan ekonomi khususnya ekonomi syariah
2. Secara praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu

   Pertama, bagi penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Bulog, Dirjen bea dan cukai, pemerintah daerah dan pemerintah pusat

   kedua, bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi dalam melanjutkan maupun mengembangkan penelitian sejenis.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin diraih, penelitian ini terkategori *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dengan studi dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi berupa dokumen-dokumen yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan fokus permasalahan. Dokumen dapat peneliti peroleh dari studi kepustakaan maupun data dari penelusuran melalui internet. Wawancara dilakukan kepada pedagang, petani, peternak, nelayan, dan masyarakat umum. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara Model wawancara yang dipakai adalah wawancara tak berstruktur (bebas). Keuntungan wawancara bebas ini, informan Model ini dipilih karena peneliti ingin menggali jawaban responden secara spontan, sehingga dapat mengeluarkan segala hal yang ingin diungkapkan, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang lengkap.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif–analisis. Karena bersifat deskriptif-analisis peneliti ingin menjelaskan secara jelas dan luas terhadap permasalahan yang diteliti terkait. Analisis data yang dilakukan bersifat iteratif (berkelanjutan) yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung. Analisis selama pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung melakukan analisis sedini mungkin data yang dibutuhkan dan sekaligus dapat melakukan pembenahan jika terdapat kekurangan data. Sedangkan analisis setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengolah lebih lanjut data yang terkumpul sesuai temuan fokus penelitian[16]

G Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Praktik Mafia Impor Pangan**

Beberapa praktik kecurangan impor yang dilakukan antara lain pemalsuan data kebutuhan pangan, pemalsuan dokumen, penghindaran pajak dan bea masuk, pelanggaran kuota, hingga mengubah aturan impor. Praktik pemalsuan dokumen impor sudah lama terjadi. Bahkan pejabat di Kementerian Pertanian sempat mengusulkan agar

[16]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*,(Bandung:Remaja Rosda Karya), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat izin impor dibuat Peruri karena mudah sekali dipalsukan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Balai Karantina di Pelabuhan Tanjung Priok memaparkan adanya manipulasi data dalam upaya penyelundupan daging sapi. Satu peti kemas berpendingin dilaporkan berisi ikan dan kepiting. Namun saat diperiksa, ternyata di dalamnya berisi enam jenis barang. Salah satunya adalah 114 karton daging sapi seberat 1,4. [17]

Praktik lain adalah manipulasi data kebutuhan pangan sehingga mengesankan bahwa di dalam negeri kekurangan pasokan pangan. Kasus yang terjadi adalah manipulasi data serapan garam di Propinsi Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2012. Selama ini Jatim mampu memproduksi garam dengan kapasitas banyak dan mampu mencukupi kebutuhan karena mendapat pasokan dari Pulau Madura selaku penghasil garam terbesar. Dibuatlah data seolah-olah garam terserap semua di masyarakat, sehingga dibuat landasan untuk impor garam. Padahal di gudang ribuan ton garam yang menumpuk.[18]

Manipulasi data kebutuhan pangan yang lain adalah memanipulasi konsumsi beras per kapita per tahun. Besarnya impor beras Indonesia, terutama sejak 2002 lalu, diduga karena adanya manipulasi data konsumsi beras nasional. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudohusodo, menduga adanya mark-up konsumsi beras sehingga menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk memberikan izin impor. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dijadikan acuan, konsumsi beras penduduk Indonesia per kapita per tahun rata-rata 133,484 kilogram. Padahal menurut penelitian yang dilakukan HKTI, konsumsi beras perkapita hanya 110 kilogram perkapita per tahun. Dengan demikian, konsumsi beras nasional per tahun

[17]www.Kompas.com. Mafia Sapi Ada di Hulu dan di Hilir. Diakses tanggal 02 September 2013
[18]http://suarakawan.com/02/03/2012/pemerintah-didesak-validitas-data-serapan-garam/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai 23,1 juta ton. Bila ditambahkan dengan kebutuhan Industri, benih, cadangan pangan dan beras sust atau tercecer, maka totalnya mencapai 29,1 juta ton per tahun.[19]

Merujuk pada fakta tersebut, tentunya diperlukan penyempurnaan metodologi penghitungan produksi dan ketersediaan pangan. Selama ini Indonesia masih mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2012 BPS merilis estimasi produksi padi sebesar 68 ton gabah kering giling atau setara 39 juta ton beras. Jika asumsi konsumsi 139,15 kilogram per kapita per tahun, total konsumsi 237,6 juta penduduk seharusnya 33 juta ton. Jika memang perhitungan data produksi pangan tersebut benar, semestinya Indonesia memiliki surplus beras sebanyak 6 juta ton, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor beras. Namun faktanya Indonesia justru mengimpor beras dalam jumlah besar. Metode penghitungan kebutuhan pangan semacam itu, ironisnya, juga terjadi pada hampir seluruh komoditas seperti jagung, kedelai, dan gula.[20]Boleh dibayangkan betapa data base ketersediaan dan kebutuhan pangan Indonesia masih lemah, dan bisa dibayangkan pula ketika data tersebut dijadikan dasar dalam membuat program, yakin bahwa dilevel implementasi bisa dinyatakan kurang berhasil.

Selain pemalsuan data dan dokumen, pengubahan aturan impor pangan juga dilakukan. Diantaranya adalah usaha pengubahan aturan impor yang terjadi pada kasus impor daging. Telah terjadi perubahan kebijakan impor yang berasal dari negara bebas penyakit menjadi zona bebas penyakit. Kasus ini sedang diselidiki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[21]

[19]http://www.tempo.co/read/news/2003/08/13/05612957/HKTI-Duga-Ada-Manipulasi-Data-Konsumsi-Beras-Nasional
[20]http://www.tempo.co/read/news/2011/09/22/090357702/Data-Sering-Surplus-Tapi-Kok-Terus-Impor-Beras
[21]idem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait penghindaran pajak dan bea masuk, praktik yang terjadi adalah dengan lobbying importir kepada petugas Bea dan Cukai. Sebagaimana diungkap Dradjad Wibowo, ekonom dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang membongkar data yang tak dipublikasikan oleh sebuah lembaga negara resmi yang menunjukkan bahwa telah terjadi pemotongan PPN dan Bea Masuk daging sapi dan jeroan sapi yang merugikan negara lebih dari Rp 540 miliar. Uang yang seharusnya masuk ke kas sebagai PPN, hilang begitu saja karena akal-akalan mafia impor sapi melibatkan petugas Bea dan Cukai. Dradjad menduga uang itu juga yang digunakan perusahaan importir membayar suap Rp 5000 per kilogram daging impor dan Rp 2000 per kilogram jeroan impor untuk politisi yang menjadi bagian dari mafia itu.[22]

Adapun praktik pelanggaran kuota yang dilakukan salah satunya adalah dengan usaha penyuapan kepada pihak penentu kebijakan agar diberikan jatah kuota impor. Seperti kasus yang masih baru terjadi terkait suap impor daging sapi yang melibatkan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Ahmad Fathanah. Kebijakan pemerintah terkait impor pangan adalah dengan memberlakukan sistem kuota yang hanya boleh dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

2. Dampak Impor Bagi Petani, Nelayan, Pengusaha Kecil, dan Masyarakat Umum

Bagi petani, impor mempunyai dampak yang cukup berarti. Tidak dipungkiri lagi, sebagian besar impor pangan adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Sebut saja beras, gandum, kedelai, dan kebutuhan pokok lainnya volume impornya naik dari tahun ke tahun. Ironis memang, negara agraris tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan

[22]Markus Junianto Sihaloho/NAD, Kebijakan Impor Pangan Ciptakan Modus Mafia Keruk Keuntungan, www. Beritasato.com. Diakses tanggal 02 September 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam negeri. Dengan dalih untuk mengamankan pasokan pangan dalam negeri pemerintah melakukan impor.

Membanjirnya produk luar negeri, sebut saja buah-buahan dan sayuran dari China, telah merusak tataniaga dan harga buah dan sayuran local yang kualitasnya lebih bagus dan harganya cukup murah. Hal ini kemudian berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan para petani lokal. Sebagai contoh produk local apel Malang yang kemudian kalah bersaing dengan buah-buahan impor dari luar dengan segala variannya. Kalah bersaing adalah faktor yang menimbulkan keengganan untuk tetap bertahan di sektor ini. Petani tidak mau rugi karena biaya produksi yang tinggi sedangkan harga jual yang murah. Untuk mengatasi ini maka perlu kejelasan dan pengawasan yang serius dalam pelaksanaan impor agar tidak berdampak berlebihan pada gairah pertanian maupun perkebuanan.

Bagi peternak, membanjirnya daging impor murah, terutama dari Australia, merusak tataniaga dan harga daging di tingkat lokal. Hal ini kemudian berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan para peternak lokal. Kalah bersaing adalah faktor yang menimbulkan keengganan untuk tetap bertahan di sektor ini. Peternak tidak mau rugi karena biaya produksi yang tinggi sedangkan harga jual yang murah.

Bagi pedagang atau pengusaha kecil impor juga memberikan pengaruh yang cukup berarti. Dengan diberlakukannya impor sekaligus kecurangan yang menyertainya seperti praktik kartel, membuat pedagang dan pengusaha kecil kalah bersaing. Harga dipermainkan oleh segelintir pengusaha yang mendapat kuota impor sehingga di pasaran harga bahan pangan menjadi mahal. Hal ini membuat daya beli masyarakat menjadi menurun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi nelayan, impor begitu terasa dampaknya, terutama bagi nelayan atau petani garam. Meski Indonesia, adalah negeri maritim dengan garis pantai terpanjang, yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan garam yang maksimal, namun nyatanya pemerintah Indonesia masih melakukan impor garam. Ironis, anak-anak keluarga petani garam tradisional di pedalaman Takalar, Sulawesi Selatan, mereka merayakan Hari Kemerdekaan untuk negara yang pemerintahnya lebih memilih jalan pintas mengimpor garam dari pada membantu orangtua mereka memperbaiki mutu dan meningkatkan produksi garam lokal.

3. Regulasi Kebijakan Impor Pangan

Kebijakan pemerintah tentang pangan mengalami dinamisasi dari jaman kuno klasik sampai pemerintahan SBY. Adapun secara terstuktur regulasi mengenai pangan terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan**;**
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi atas Manusia;
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
h. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
i. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain regulasi mengenai pangan, ada beberapa regulasi yang khusus membahas impor. Regulasi tersebut antara lain;

a. Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
b. Inpres Nomor 9 tahun 2002 tentang penetapan kebijakan keberasan.
c. Kep. MPP No. 9/MPP/Kep/1/2004.
d. Kep. MPP No. 368/MPP/Kep/5/2004.
e. Surat MENDAG No. 71/M/XII/2004.
f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 357/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/I/ 2004 tentang Ketentuan Impor Beras.[23]

Terdapat juga regulasi kebijakan impor terbaru yang diterbitkan pemerintah terkait komoditas pangan seperti kedelai, daging sapi, dan buah ataupun sayuran, seperti cabai dan bawang merah. Regulasi tersebut adalah:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.
b. Permendag Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendag Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
c. Permendag Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

[23]http://disperindag.kalbarprov.go.id/inventory/download/192e402f0c798b7fb43e7f95f336d022.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perspektif Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Perspektif Ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui tiga pilar penting yaitu ketersediaan pangan dengan konsep produksi Islam dan mekanisme pasar, keterjangkauan pangan dengan konsep distribusi yang berkeadilan, dan konsep pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengusung konsep konsumsi Islam

H. Kesimpulan

1. Praktik mafia impor pangan terjadi di hulu maupun hilir. Di hulu, kecurangan impor terjadi pada ranah regulasi, sedangkan di hilir kecurangan impor yang dilakukan antara lain pemalsuan data kebutuhan pangan, pemalsuan dokumen, penghindaran pajak dan bea masuk, pelanggaran kuota.
2. Dampak impor sangat dirasakan oleh petani, nelayan, pengusaha kecil, dan masyarakat umum lainnya.
3. Regulasi kebijakan pangan di Indonesia mengalami dinamisasi dari waktu ke waktu, mulai zaman kuno klasik sampai pemerintahan SBY.
4. Perspektif Ekonomi Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui tiga pilar penting yaitu ketersediaan pangan dengan konsep produksi Islam dan mekanisme pasar, keterjangkauan pangan dengan konsep distribusi yang berkeadilan, dan konsep pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengusung konsep konsumsi Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id